



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional pemerintah daerah, sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perlu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan program dan kebijakan yang dilaksanakan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama meliputi:
  - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
  - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
- (3) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.
- (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian Indikator Kinerja Utama ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 Oktober 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 17 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 48

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan	1	PDRB per Kapita (ADHK)					PDRB tahun n / jumlah penduduk tahun n	Sekretariat Daerah	
		2	Indeks Daya Saing Daerah					Nilai IDSD	Sekretariat Daerah	
				1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, Pendidikan, dan pengeluaran	Sekretariat Daerah
						2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Rasio IPM perempuan dengan laki-laki	Sekretariat Daerah
						3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari 3 (tiga) kompone, keterwakilan di parlemen; pengambilan keputusan dan	Sekretariat Daerah
				2	Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi		$\{(PDRB\ th\ n - PDRB\ th\ (n-1)) : PDRB\ th\ (n-1)\} * 100$	Sekretariat Daerah
				3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)		Persentase pendapatan penduduk 40% terendah terhadap total pendapatan	Sekretariat Daerah
			2			Persentase Penduduk Miskin		Jumlah penduduk miskin di Kab.Batang dibagi jumlah penduduk Kab.Batang	Sekretariat Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab		
				3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Sekretariat Daerah	
			4	Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi	1	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = $0,4122 \times \text{jalan} + 0,4149 \times \text{air} + 0,4620 \times \text{sanitasi} + 0,4368 \times \text{pkpl} + 0,5037 \times \text{telp\_int}$ Indeks Infrastruktur dibentuk dari indicator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah	Sekretariat Daerah
			5	Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten = $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + 0,219 \times IKL$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi			Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Penataan	Sekretariat Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
					Sistem Manajemen SDM; 6. Penguatan Akuntabilitas; 7. Penguatan Pengawasan; dan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			1 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Nilai SAKIP	(30% perencanaan kinerja + 25% pengukuran kinerja + 15% pelaporan kinerja + 10% evaluasi internal + 20% capaian kinerja)	Sekretariat Daerah
				2 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan	Sekretariat Daerah
				3 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. Penyerapan anggaran; 5. Kondisi keuangan daerah; 6. Opini BPK atas LKPD	Sekretariat Daerah
			2 Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui <i>agile governance</i>	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif, melalui survey kepada masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif	1 Indeks Risiko Bencana (IRBI)			Perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability, kapasitas (capacity)	Sekretariat Daerah
		2 Indeks Rasa Aman			Survei/kuesioner kepada masyarakat	Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
	masyarakat yang kondusif	2	Indeks Rasa Aman			Survei/kuesioner kepada masyarakat	Sekretariat Daerah
		1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Kuantitatif dan kualitatif, melalui kuesioner terhadap 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah	Sekretariat Daerah
		2	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	1	Indeks Demokrasi	Kualitatif, melalui kuesioner	Sekretariat Daerah
		3	Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	1	Angka Kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk	Sekretariat Daerah

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
Dinas Kesehatan (Dinkes)							
1.		Menurunnya angka kematian dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu ( <i>maternal</i> ) di suatu wilayah pada ukuran waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama kali 1.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			3	Angka Prevalensi Balita <i>Stunting</i>	Jumlah balita 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama kali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			4	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009)	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dibagi jumlah seluruh penduduk kali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
			5	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019)	Jumlah puskesmas dengan jumlah tenaga sesuai standar dibagi jumlah puskesmas kali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			6	Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021)	Jumlah sarana kefarmasia yang sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian kali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri, (Kepmenkes Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010)	Jumlah Desa Siaga aktif strata mandiri dibagi jumlah desa/kelurahan/desa/kelurahan kali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)							
1		Meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan dalam mewujudkan penguatan perilaku pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif	1	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk.	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		Meningkatkan upaya pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkandaya saing daerah	1	Persentase Pengunjung Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	(Jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) dibagi jumlah festival seni yang ditargetkan) dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3		Meningkatnya profesional dan efektivitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan Pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	1	Nilai SAKIP Disdikbud	Nilai SAKIP Disdikbud hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)							

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
1.		Meningkatnya konektivitas jalan dan jembatan di daerah	1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Jumlah Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi jumlah total Panjang jalan kabupaten/kota dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Meningkatnya kualitas infrastruktur suber daya air irigasi	1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3		Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung	1	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi dibagi jumlah bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		Meningkatnya pemanfaatan ruang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL/HGB 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPUPR	1	Nilai SAKIP DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR hasil evaluasi dari evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)							
1.		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan Kawasan pemukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan	1	Persentase rumah layak huni	(Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah se Kabupaten Batang) dikali 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	2		Persentase perumahan dan lingkungan pemukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	(Luasan perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik dibagi luas total perumahan dan pemukiman) dikali 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	3		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman yang layak	(Jumlah infrastruktur yang dipenuhi dibagi jumlah infrastruktur yang ada) dikali 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	4		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	(Luas lingkungan kumuh yang tertangani dibagi luas lingkungan kumuh) dikali 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
2.		Meningkatnya penyelesaian permasalahan pertanahan	1	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	{(Jumlah sengketa tanah tahun berkenaan -jumlah sengketa tanah tahun lalu) dibagi jumlah sengketa tanah tahun lalu} dikali 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			2	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	(Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar) dikali 100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPRKP	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRKP	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (DPRKP)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			2	Nilai SAKIP DPRKP	Nilai SAKIP DPRKP hasil evaluasi dari Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Dinas Sosial (Dinsos)							
1.		Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan social serta perubahan perilaku bagi PPKS	1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi social dibagi jumlah PMKS di Kabupaten Batang dikali 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2.		Meningkatnya kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1	Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos dibagi jumlah PSKS di Kabupaten Batang dikali 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
3		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	Skor nilai SAKIP Dinas Sosial	Skor nilai SAKIP Dinas Sosial hasil evaluasi dari Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)							

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
1.		Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan melalui keluarga berencana	1	TFR (Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total)	TFR : 5 Σ ASFR ASFR : Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.		Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	1	Terpenuhinya indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	(Jumlah kecamatan yang sudah layak anak dibagi jumlah kecamatan) dikali 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	Angkatan Kerja Perempuan	(Jumlah angkatan kerja perempuan dibagi jumlah penduduk usia kerja perempuan) dikali 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.		Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	Nilai SAKIP DP3AP2KB	Nilai SAKIP DP3AP2KB hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pangan dan Pertanian (Dispapterta)							
1.		Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	1	Persentase peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi produk pertanian (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, bawang merah, bawang daun, cabai besar, kentang, kubis, kelapa, cengkeh)	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
					tahun N – (N-1)dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikalikan 100		
2		Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	1	Ketersediaan bahan pangan pokok : Beras	Produksi gabah kering panen dikurangi angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74%	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
			2	Ketersediaan bahan pangan utama : jagung	Produksi jagung dikurangi angka susut taua dikalikan dengan angka konversi jagung 89%	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
			3	Cadangan pangan daerah (Ton)	Jumlah cadangan pangan kabupaten dibagi standar cadangan pangan kabupaten dikali 100	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
3.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Pangan dan Pertanian	1	Nilai SAKIP Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pangan dan Pertanian hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dislutkanak)							
1.		Meningkatnya persentase capaian produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	1	Persentase capaian produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap dibagi target produksi perikanan tangkap dikali 100	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
			2	Persentase capaian produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya dibagi target produksi perikanan budidaya dikali 100	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
2.		Meningkatnya konsumsi makan ikan bagi masyarakat Kabupaten Batang	1	Persentase capaian tingkat konsumsi makan ikan	Tingkat konsumsi makan ikan (Kg/kapita/tahun) dibagi target tingkat konsumsi makan ikan (Kg/kapita/tahun) dikali 100	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
3.		Meningkatnya produksi hasil ternak	1	Jumlah hewan/ternak yang terobati	Jumlah hewan/ternak yang terobati dalam 1 tahun	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
4.		Meningkatnya jumlah hewan/ternak yang terobati	1	Jumlah hasil ternak (daging, telur dan susu)	Jumlah populasi dan produksi hasil ternak dalam 1 (satu) tahun	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
5.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1	Nilai SAKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)							
1.		Meningkatnya penduduk yang memiliki data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap	1	Persentase kepemilikan identitas penduduk dan akte kelahiran	{(Jumlah kepemilikan KIA dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun) ditambah (Jumlah penduduk ber-KTP elektronik dibagi Jumlah penduduk usia di atas 17 tahun) ditambah (Jumlah penduduk ber-akte kelahiran usia 0-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun) dibagi 3} dikali 100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.		Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkatnya validitas database kependudukan	1	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	{(Jumlah data ganda dan anomaly tahun lalu-data ganda dan anomali tahun ini) dibagi jumlah data ganda dan anomali tahun lalu} dikali 100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil evaluasi dari Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)							
1.		Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang	1	Jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMBN	Jumlah investasi tahun N – jumlah tahun N-1 di Kab.Batang dibagi jumlah investasi tahun N-1 di Kab.Batang dikali 100%	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
2.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP	1 Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)						
1		Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik	1 Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	Jumlah informasi yang diakses publik dibagi jumlah penyebaran informasi dikali 100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1 Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengguna data statistik sektoral dibagi jumlah Perangkat Daerah produsen data dikali 100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
3		Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah daerah	1 Indeks Keamanan Informasi	Perhitungan Indeks Keamanan dapat dilakukan oleh BSSN atau melalui evaluasi internal sesuai dengan Indeks Keamanan Informasi setiap satu tahun sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
4		Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik berbasis <i>smart city</i>	1 Indeks SPBE 2 Indeks <i>Smart City</i>	Domain SPBE Dimensi <i>Smart City</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
5		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Diskominfo	1 Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika hasil penilaian Tim evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)						
1		Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja	1 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
2.		Meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Persentase pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	Penduduk penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan



NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
3		Meningkatnya pelayanan publik yang cerdas, cepat dan responsif	1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Jumlah sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
Dinas Perhubungan (Dishub)							
1.		Meningkatnya penataan transportasi dan keselamatan lalu lintas	1	Rasio ijin trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Disperpuska)							
1		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan baik dari segi aksesibilitas dan kapasitas	1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	(Total UPLM1-7 dibagi AM) dikali 100 UPLM: Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat (ada 7 unsur) AM: Aspek Masyarakat	Disperpuska	Disperpuska
2		Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	1	Tingkat kesiapan perlindungan dan penyelamatan arsip di LKD	(Jumlah NSPK kesiapan perlindungan dan penyelamatan arsip terpenuhi dibagi jumlah NSPK kesiapan perlindungan dan penyelamatan arsip seluruhnya) dikali 100 NSPK: Norma Standar Prosedur Kriteria	Disperpuska	Disperpuska
3		Meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Disperpuska yang mencapai target	(Jumlah indikator kinerja Disperpuska yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja	Disperpuska	Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
					Disperpuska seluruhnya) dikali 100		
4		Meningkatnya pelayanan publik yang cerdas, cepat dan responsif	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Disperpuska	Hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik Disperpuska	Disperpuska	Disperpuska
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM)							
1.		Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas koperasi di Kabupaten Batang	1	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	{{(Jumlah koperasi aktif tahun n-jumlah koperasi aktif tahun n-1) dibagi jumlah koperasi tahun n-1} dikali 100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2.		Meningkatnya daya saing UMKM	1	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	{{(Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi di tahun n-jumlah UMKM yang terstandarisasi tahun n-1) dibagi jumlah UMKM yang terstandarisasi tahun n-1} dikali 100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.		Meningkatnya Pertumbuhan Industri	1	Persentase pertumbuhan industri	{{(Jumlah IKM tahun n-jumlah IKM tahun n-1) dibagi jumlah IKM tahun n-1} dikali 100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
4		Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri PDRB(ADHB)	1	Persentase perdagangan besar, kecil, reparasi mobil dan sepeda motor	Nilai PDRB dibagi jumlah keseluruhan nilai PDRB	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
5		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disperindagkop	1	Nilai SAKIP Disperindagkop	Nilai SAKIP Disperindagkop hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)							
1		Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi modal sosial, kesehatan, Pendidikan dan pemukiman	Dispermades	Dispermades

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
			2	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi	Dispermades	Dispermades
			3	Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks Ketahanan Ekologi terdiri dari dimensi ekologi	Dispermades	Dispermades
2		Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase PKK aktif	Jumlah PKK aktif dibagi jumlah PKK dikali 100	Dispermades	Dispermades
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dispermades	1	Nilai SAKIP Dispermades	Nilai SAKIP Dispermades hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Dispermades	Dispermades
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora)							
1.		Peningkatan prestasi olahraga	1	Jumlah medali yang diperoleh	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			2	Persentase prestasi pemuda berprestasi	(Jumlah pemuda berprestasi dibagi jumlah total pemuda) dikali 100	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.		Meningkatnya pengunjung/ wisatawan	1	Persentase inovasi ekonomi kreatif	(Jumlah inovasi produk ekonomi kreatif dibagi jumlah produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) dikali 100	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			2	Persentase pendapatan sektor pariwisata	{(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N dikurangi jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N-1) dibagi jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun N-1} dikali 100	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3		Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata	1	Persentase meningkatnya pengunjung/ wisatawan	{(Jumlah wisatawan tahun N dikurangi jumlah wisatawan tahun N-1) dibagi jumlah wisatawan tahun N-1} dikali 100	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Disparpora	1	Nilai SAKIP Disparpora	Nilai SAKIP Disparpora hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)							

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
1.		Meningkatnya penghargaan lingkungan hidup	1	Persentase penghargaan yang diperoleh	(Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh dibagi jumlah penghargaan yang diperoleh) dikali 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.		Meningkatnya pengelolaan sampah	1	Persentase tempat pembuangan sampah	(Jumlah sampah yang dibuang di TPA dibagi jumlah sampah) dikali 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKA (Indeks Kualitas Air) + Nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) + IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DLH	1	Nilai SAKIP DLH	Nilai SAKIP DLH hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang)							
1.		Terwujudnya perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah	1	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program APBD tahun berkenaan dikali 100	Bapelitbang	Bapelitbang
2.		Terwujudnya kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase kesesuaian program Renja perangkat daerah dengan Renstra perangkat daerah	Jumlah program dalam Renja perangkat daerah dibagi jumlah program dalam Renstra perangkat daerah dikali 100	Bapelitbang	Bapelitbang
3.		Meningkatnya efektivitas pembangunan daerah berbasis hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	(Hasil kelitbangan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang telah dilaksanakan) dikali 100	Bapelitbang	Bapelitbang
			2.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dibagi jumlah perangkat daerah) dikali 100	Bapelitbang	Bapelitbang

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Bapelitbang	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bapelitbang	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Bapelitbang	Bapelitbang	Bapelitbang
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)							
1.		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas	1	Persentase kepatuhan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan	(Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dibagi jumlah total Perangkat Daerah) dikali 100	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
2.		Meningkatnya realisasi penerimaan PAD	1	Persentase peningkatan PAD	{(PAD tahun berjalan dikurangi PAD tahun sebelumnya) dibagi PAD tahun sebelumnya} dikali 100	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3.		Meningkatnya Kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah	1	Nilai SAKIP BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)							
1.		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	(Total nilai persepsi responden per parameter dibagi total parameter yang terisi) dikali (1/jumlah parameter) dikali nilai dasar 25	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			2	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	(Jumlah Aparatur Sipil egera Kabupaten Batang yang memiliki kinerja "baik" dibagi jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Batang) dikali 100	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
2.		Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya	1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat	(Jumlah realisasi Aparatur Sipil Negara yang dilatih	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
			kemampuannya sesuai bidang tugas	dibagi jumlah pendaftar pelatihan) dikali 100		
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	1 Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)						
1		Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman, dan tertib	1 Persentase demo tertangani	Persentase masyarakat yang mengikuti Wawasan Kebangsaan: (Jumlah masyarakat yang telah mendapat sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus dibagi jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi Wawasan Kebangsaan) dikali 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah: (Jumlah partai politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah dibagi jumlah partai politik dan Lembaga Pendidikan di Batang) dikali 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	1 Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaan dibagi jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) dikali 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol	1 Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)						

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1		Terwujudnya penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	1 Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	(Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana+Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana+Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)/4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	1 Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP BPBD hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)						
1		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dibagi jumlah keseluruhan gangguan ketentraman, ketertiban umum) dikali 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
2		Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran	1 Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) dikali 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
3		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Satpol PP	1 Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Inspektorat Daerah						
1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa	1 Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dikali 100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
			2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	
				terselesaikan dibagi jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan dikali 100			
2		Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan hasil pengawasan dikali 100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Sekretariat Dewan (Setwan)							
1		Meningkatnya fasilitasi tugas, fungsi, wewenang dan hak DPRD	1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat anggota DPRD dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat DPRD	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan
2		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Dewan sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai SAKIP Sekretariat Dewan hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan
Sekretariat Daerah (Setda)							
1		Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	Hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah	1	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP B	(Jumlah perangkat daerah dengan nilai SAKIP B dibagi jumlah perangkat daerah) dikali 100	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			2	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah hasil evaluasi Tim evaluator AKIP Kabupaten	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Kecamatan							
1		Meningkatnya jumlah desa maju dan desa mandiri di kecamatan	1	Persentase jumlah desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri tiap tahun	(Jumlah desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri dibagi jumlah seluruh desa) dikali 100	Kecamatan	Kecamatan



NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6	7
2		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum	1	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	(Jumlah gangguan trantibun yang dapat diselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibun) dikali 100	Kecamatan	Kecamatan
3		Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
4		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan administrasi perangkat daerah	1	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	Kecamatan	Kecamatan
	RSUD						
1		Terlayannya kesehatan masyarakat secara aman dan bermutu	1	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki dibagi dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya dimiliki dikali 100	RSUD	RSUD
	2		Persentase capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Nilai rata-rata unsur capaian peningkatan mutu dan keselamatan pasien	RSUD	RSUD	
	3		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	Hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik RSUD	RSUD	RSUD	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI